

BAB IV

KALKULASI UNTUNG RUGI YUNANI MENYETUJUI BAILOUT DARI UNI EROPA PASCA REFERENDUM TAHUN 2015

Bantuan dana merupakan sebuah hal mutlak yang dibutuhkan oleh Yunani agar dapat terlepas dari jeratan krisis perekonomian yang sedang terjadi dalam negeri para dewa tersebut. Oleh karena itu, hasil referendum yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, apabila dijalankan maka akan tidak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan nasional Yunani. Jika di analisa menggunakan asas keuntungan dan kerugian, maka menerima *bailout* adalah pilihan yang paling menguntungkan bagi Yunani dalam upayanya untuk meredam krisis ekonomi. Penjelasan mengenai keuntungan dan kerugian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

A. Keuntungan Yunani Menerima Bailout Tahun 2015

Meskipun pemerintah Yunani pada masa PM Alexis Tsipras memiliki kebijakan yang menentang Uni Eropa, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Yunani sangat membutuhkan dana talangan yang ditawarkan oleh Uni Eropa untuk dapat terhindar dari kebangkrutan akibat gagal membayar hutang luar negeri yang akan jatuh tempo. Hingga pada akhirnya, meskipun telah melalui re-negosiasi dengan pihak Uni Eropa, PM Alexis Tsipras kemudian menyetujui persyaratan *bailout* yang ditawarkan oleh Uni Eropa yang menuntut Yunani untuk melakukan penghematan anggaran dalam negeri, dengan kata lain kembali menerapkan kebijakan yang memberatkan rakyatnya.

Pada dasarnya, Yunani telah terjebak dengan hutang luar negerinya dan telah lama menjadi negara yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap hutang luar negeri. Oleh karena itu, tetap berada dalam sistem integrasi ekonomi yang dibentuk oleh Uni Eropa adalah pilihan terbaik bagi Yunani. Dengan menerima *bailout* beserta persyaratannya yang ditawarkan oleh Uni Eropa, Yunani akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mempertahankan perekonomiannya. Dengan kata lain, menerima *bailout* dengan segala persyaratannya lebih menguntungkan dari menolak *bailout* dan keluar dari Uni Eropa. Keuntungan yang didapat oleh Yunani pasca pencairan dana talangan adalah sebagai berikut:

I. Yunani Mampu Membayar Hutang Luar Negerinya

Permasalahan terbesar dalam perekonomian Yunani terletak pada aspek hutang luar negeri. Selain mengalami defisit anggaran, jumlah hutang luar negeri yang tidak seimbang dengan PDB telah menjadi faktor utama munculnya krisis berkepanjangan dalam perekonomian Yunani. Sudah lebih dari 10 tahun rasio hutang luar negeri Yunani berada di atas angka 100% dari PDBnya, bahkan di tahun 2014 yang lalu rasio hutang luar negeri Yunani berada di puncak tertinggi sepanjang sejarah Yunani yaitu 180% dari PDB. Maka tidak mengherankan apabila perekonomian Yunani berada di titik kekacauan yang amat tinggi. Hal tersebut juga menandakan bahwa dalam jangka panjang Yunani akan terus menghadapi problema yang sama. Pada akhirnya, kebijakan ekonomi Yunani dapat dipastikan akan terfokus pada upaya untuk mengatasi permasalahan hutang luar negeri tersebut dalam beberapa tahun ke depan.

Yunani sejatinya bukan lah negara yang dapat mengatur perekonomiannya dengan efektif semenjak pertama kali terbentuk. Bisa dikatakan bahwa Yunani adalah negara yang hidup berkat hutang luar negeri. Tingkat dependensi Yunani terhadap hutang luar negeri terbilang sangat tinggi. Namun sangat disayangkan hal tersebut tidak diimbangi dengan manajemen hutang yang baik. Yunani kerap kali membelanjakan dana yang diperoleh dari hutangnya di sektor-sektor yang bersifat konsumtif seperti kebutuhan militer dan sektor publik (gaji pegawai, dana pensiun, dll). Sehingga tidak mengherankan apabila tingkat konsumsi Yunani jauh lebih tinggi dari tingkat produksinya, ketidakseimbangan tersebut lalu menyebabkan terjadinya defisit pada anggaran negara.

Diawali dari defisit anggaran, kemudian ditambah dengan jumlah hutang luar negeri yang bernilai jauh diatas PDBnya, dana bantuan kemudian menjadi hal yang mutlak dibutuhkan untuk Yunani setelah berbagai kebijakan penghematan dan penjualan ribuan aset negara dinilai belum mampu untuk mendongkrak perekonomian Yunani. Selama setengah tahun masa kepemimpinan Alexis Tsipras, Yunani tidak mengimplementasikan kebijakan penghematan apapun, hal itu berimbas kepada ketidakmampuan Yunani dalam mengurangi dana APBN. Efek dari ketidakmampuan tersebut adalah tidak adanya dana yang dapat dialokasikan untuk membayar cicilan hutang Yunani kepada IMF yang jatuh tempo pada Juni 2015. Apabila Yunani tidak

dapat membayar hutang tersebut maka Yunani akan dinyatakan *default* atau bangkrut.¹

Untuk menghindari hal tersebut, satu-satunya cara bagi Yunani adalah dengan mengejar dana talangan yang ditawarkan oleh Uni Eropa. Berbekal hasil referendum yang diadakan pada tanggal 5 Juli 2015, pemerintah Yunani kemudian mengajukan proposal *bailout* yang baru dan mengadakan re-negosiasi dengan pihak Uni Eropa untuk mencairkan dana talangan guna menghindarkan Yunani dari kebangkrutan.² Selain itu, rasio hutang Yunani terhadap PDBnya yang terlampau tinggi tidak memungkinkan bagi Yunani untuk mengatasinya sendiri dalam jangka pendek, sehingga *bailout* yang ditawarkan oleh Uni Eropa adalah hal mutlak yang dibutuhkan oleh Yunani.

Terbukti setelah pencairan dana *bailout* disetujui oleh Uni Eropa pada 18 Juli 2015, Yunani mampu melunasi hutangnya kepada IMF dan berhasil menghindari status *default* atau bangkrut. Dengan pencairan dana *bailout* tersebut pula Yunani hingga kini masih tergabung dengan *Eurozone* dan integrasi ekonomi milik Uni Eropa. Selain itu, Yunani tidak terbebani dengan suku bunga hutang yang tinggi apabila skenario krisis Yunani tidak berjalan sesuai rencana, dengan kata lain meminjam dana kepada pihak di luar Uni Eropa.

Pada dasarnya, sebagai negara yang memiliki tingkat dependensi yang tinggi terhadap hutang luar negeri, keputusan Yunani untuk tetap tergabung

¹ CTV News, "Greece Fails To Make IMF Payment As Bailout Expires" (Online) <http://www.ctvnews.ca/business/greece-fails-to-make-imf-payment-as-bailout-expires-1.2446852> diakses pada 8 November 2016

² Politico, "Greece Default Debt Referendum" (Online) <http://www.politico.eu/article/greece-default-debt-referendum-2015/> diakses pada 8 November 2016

dalam Uni Eropa, khususnya Eurozone, dengan cara menyetujui persyaratan *bailout* yang ditawarkan oleh Uni Eropa merupakan pilihan yang terbaik bagi Yunani mengingat Uni Eropa hanya menetapkan suku bunga yang rendah yakni 0.1% dalam program integrasi ekonominya. Artinya, berhutang kepada Uni Eropa jauh lebih menguntungkan dan aman dari IMF atau sektor swasta bagi Yunani.³

II. Menstabilkan Kondisi Perekonomian Dalam Negeri Yunani

Krisis keuangan yang menggoncang Yunani telah membuat sistem perekonomian di Yunani berantakan. Selama lebih dari satu dekade Yunani mengalami keterpurukan ekonomi dan situasi tersebut menjadi semakin kacau setelah krisis mengalami akselerasi pada tahun 2009. Meskipun dikenal sebagai negara yang melahirkan berbagai bidang keilmuan termasuk tempat dimana demokrasi dilahirkan, dalam sejarahnya, Yunani tidak memiliki kemampuan untuk mengelola keuangannya dengan baik.

Yunani memiliki pengelolaan yang buruk dalam hal keuangan, hal tersebut dapat dilihat dari susunan anggaran belanja dalam negerinya dimana pengeluaran belanja untuk kegiatan yang tergolong konsumtif sangat tinggi. Hal yang paling mudah terlihat adalah pengeluaran pada sektor publik seperti gaji pegawai negeri dan dana pensiun. Yunani memang dikenal memiliki kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan rakyat, namun bukan berarti hal tersebut merupakan hal yang baik untuk sebuah negara. Menyejahterakan rakyat berbanding lurus dengan pengeluaran dalam negeri yang bersifat

³ ECB Official Website <http://www.ecb.int/stats/money/long/html/index.en.html> diakses pada 8 November 2016

konsumtif. Di Yunani sendiri, kebijakan pemerintah pada masa sebelum krisis sangat memanjakan rakyatnya, dimana tercatat pada tahun 2009 rata-rata pendapatan warga Yunani adalah sebesar €1.300 per bulan, dan rata-rata pendapatan pertahun adalah €17.000, angka tersebut masih lebih tinggi dari beberapa negara anggota Uni Eropa yang lain seperti Portugal, Polandia, dan Republik Ceko.⁴

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemapanan di Yunani terbilang cukup tinggi. Tingkat kemapanan yang tinggi akan menimbulkan tingkat konsumtif yang juga semakin tinggi. Apabila didorong dengan kebijakan-kebijakan yang terus menerus memanjakan rakyat, maka dalam jangka panjang efeknya adalah sulitnya menerapkan kebijakan penghematan karena rakyat Yunani sudah terbiasa dimanjakan dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada kesejahteraan rakyat.

Selain itu, kebijakan pensiun juga menjadi problema tersendiri bagi Yunani. Pasalnya, Yunani memiliki kebijakan dimana dana pensiun seorang pegawai negeri dapat diwariskan kepada keturunannya. Disamping hal itu, batas usia pensiun di Yunani sebelum memasuki masa krisis tergolong kecil yakni pada usia 57 tahun, dimana dalam standar global usia tersebut masih tergolong dalam usia produktif. Kedua kebijakan tersebut menjadi bumerang bagi Yunani dimana pemborosan dana pensiun tidak bisa terhindarkan akibat dari banyaknya jumlah pegawai yang memutuskan pensiun dini dan meningkatnya jumlah pengangguran akibat dari kebijakan pewarisan dana

⁴ European Union Official Website http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page diakses pada 8 November 2016

pensiun tersebut. Banyak pemuda Yunani yang kemudian memutuskan untuk tidak bekerja karena telah mendapatkan hak dana pensiun dari orang tua mereka. Pada akhirnya kebijakan tersebut menjadi salah satu penyebab menurunnya tingkat produktifitas dalam perekonomian Yunani.

Dengan kebijakan yang memanjakan rakyat tersebut, Yunani akan menghadapi permasalahan jangka panjang dalam hal dana pensiun apabila tidak segera dilakukan revisi kebijakan. Pemborosan tersebut juga menjadi salah satu penyebab defisit anggaran yang kemudian memicu terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan di Yunani. Untuk mengatasi hal itu lah mengapa bantuan dana yang ditawarkan oleh Uni Eropa terlihat begitu menarik bagi petinggi Yunani. Hal tersebut dikarenakan bantuan dana talangan diberikan disertai persyaratan penghematan yang mampu mengatasi pemborosan tersebut dan dapat diimplementasikan dengan implikasi bahwa Yunani tidak memiliki jalan lain dan kebijakan penghematan merupakan inisiasi dari pihak Uni Eropa sehingga tidak mencederai citra pemerintah di mata rakyat.

Perlu diketahui bahwa Yunani telah tiga kali menerima dana talangan dari Uni Eropa selama masa krisis. Yang pertama adalah pada tanggal 2 Mei 2010 sebesar €110 milyar, pada tanggal 30 Maret 2014 sebesar €130 milyar dan yang terakhir adalah pada masa kepemimpinan Alexis Tsipras pada tanggal 18 Juli 2015 sebesar €87 milyar. Ketiga bantuan dana tersebut datang disertai dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Yunani. Persyaratan-persyaratan tersebut mayoritas adalah tuntutan untuk menerapkan kebijakan penghematan gaji pegawai, dana pensiun,

restrukturisasi pajak, dan pemotongan hubungan kerja, kebijakan-kebijakan yang selama ini sulit untuk diterapkan di Yunani tanpa ada faktor eksternal.

Meskipun mengorbankan kesejahteraan rakyat dan menimbulkan permasalahan lain dalam jangka panjang seperti peningkatan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan, namun hal tersebut juga membantu Yunani dalam menghemat anggaran belanja dalam negerinya selama beberapa tahun mendatang. Hal tersebut lah yang mendasari keputusan hampir seluruh pemimpin Yunani selama masa krisis terhitung dari 2009 hingga 2015 untuk menerima *bailout* dari Uni Eropa. Dimana bailout-bailout tersebut menjadi justifikasi atau pembenaran untuk menerapkan kebijakan-kebijakan penghematan.

Selain pada permasalahan dana pensiun, Yunani juga perlu membenahi perekonomiannya dari segi investasi. Seperti yang telah diketahui, nilai investasi Yunani selama masa krisis terus mengalami penurunan. Hal tersebut tidak lepas dari penilaian perusahaan-perusahaan pemeringkat kredit seperti Standard & Poor's, Moody's, dan Fitch yang terus menurunkan nilai peringkat kredit Yunani hingga masuk pada zona sampah di tahun 2015. Secara tidak langsung, hal tersebut mempengaruhi arus investasi di Yunani. Banyak perusahaan asing yang hendak menanam investasi di sebuah negara menjadikan penilaian perusahaan pemeringkat kredit sebagai salah satu pertimbangan sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi, maka dari itu, peringkat yang rendah menandakan bahwa negara tersebut tidak memiliki potensi yang tinggi dalam hal investasi. Hal terbukti bahwa selama masa

krisis, angka perusahaan yang gulung tikar di Yunani mencapai ratusan ribu yang terdiri dari perusahaan besar maupun kecil, lokal maupun multinasional.

Hal tersebut dapat terjadi karena potensi kebangkrutan Yunani yang tinggi. Pada kasus Yunani, apabila Yunani dinyatakan *default* atau bangkrut maka akan menggoyangkan statusnya dalam keanggotaan Eurozone dan Uni Eropa. Maka, resiko yang mengancam perusahaan investasi yang berasal dari luar akan lebih besar mengingat bahwa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apabila Yunani keluar dari keanggotaan Uni Eropa bukanlah kemungkinan yang bersifat positif. Pada dasarnya, ancaman ekonomi yang menunggu Yunani apabila keluar dari keanggotaan Uni Eropa sangat besar.

Yang pertama adalah apabila Yunani dinyatakan bangkrut dan keluar dari Eurozone, maka artinya Yunani harus menghentikan penggunaan Euro sebagai mata uang resminya dan menggantinya dengan mata uang sebelumnya yang digunakan Yunani yaitu Drachma. Namun, dengan kondisi ekonomi yang berantakan, dapat dipastikan bahwa nilai tukar Drachma terhadap mata uang lain akan sangat rendah. Yang kedua adalah terganggunya mobilisasi penduduk Yunani karena sudah tidak terintegrasi dengan negara-negara lain yang berada dalam keanggotaan Uni Eropa. Hal tersebut dikarenakan Yunani tidak lagi terikat dengan kebijakan bebas visa yang ada dalam agenda kebijakan integrasi Uni Eropa.

Dan yang ketiga adalah Yunani tidak bisa lagi menikmati keuntungan yang didapatkan dari integrasi regional yang didirikan oleh Uni Eropa khususnya dalam hal ekonomi. Yunani harus membangun ulang perjanjian-

perjanjian bilateralnya dengan seluruh mitra kerjasama yang berasal dari Uni Eropa. Dalam hal perdagangan khususnya ekspor dan impor dimana mitra Yunani yang terbesar pada bidang tersebut adalah Italia dan Jerman yang notabene merupakan anggota Uni Eropa, Yunani tidak akan bisa lagi menikmati kebijakan pasar bebas yang akan membuatnya dikenai pajak perdagangan antar negara-negara tersebut.

Maka dari itu, *bailout* yang ditawarkan oleh Uni Eropa bukan sekedar dana pinjaman biasa melainkan juga menentukan nasib Yunani pada masa mendatang. Hal tersebut dikarenakan pihak Uni Eropa memberikan ancaman pada Yunani bahwa keputusan Yunani untuk menerima dana talangan atau tidak akan mempertaruhkan status keanggotaan Yunani dalam Uni Eropa. Pada akhirnya, Yunani tidak memiliki jalan lain dan bantuan dana tersebut memang merupakan pilihan terbaik bagi keberlangsungan ekonomi Yunani dan dapat memicu perkembangan perekonomian Yunani untuk masa mendatang.

Analisa tersebut terbukti pada masa kepemimpinan Antonis Samaras bahwa keadaan ekonomi Yunani sedikit membaik setelah Yunani menerima *bailout* keduanya dari Uni Eropa. Dana talangan kedua Yunani yang diberikan oleh Uni Eropa pada tanggal 30 Maret 2014 sebesar €130 milyar telah membantu Yunani untuk kembali memasuki pasar saham internasional dan meningkatkan nilai investasi Yunani. Tiga perusahaan pemeringkat kredit yakni Standart & Poor's, Moody's, dan Fitch pun menaikkan peringkat kredit Yunani dari yang sebelumnya B- menjadi B. Hal itu menunjukkan bahwa ketiga perusahaan pemeringkat kredit tersebut mengakui adanya angin positif

dari perekonomian Yunani setelah menerima dana talangan dari Uni Eropa. Selain itu, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Yunani pada tahun 2014 meningkat sebesar kurang lebih 5 juta jiwa. Hal tersebut menandakan adanya pergerakan positif yang diterima oleh Yunani pasca penerimaan *bailout* dari Uni Eropa.

Berkaca dari pemerintahan sebelumnya, maka tidak mengherankan apabila perkembangan positif dalam perekonomian Yunani kembali diraih oleh Perdana Menteri Alexis Tsipras setelah menerima *bailout* dari Uni Eropa dimana bantuan dana tersebut adalah yang ketiga selama Yunani berada dalam masa krisis. Bahkan, pada saat dimana proposal dana talangan baru saja disetujui oleh kedua pihak, Yunani dan Uni Eropa, Bank Sentral Eropa menyatakan akan memberikan dana bantuan darurat atau dana ELA (Emergency Liquidity Assistance) kepada bank sentral Yunani.⁵ Perlu diketahui bahwa sejak akhir Juni 2015 atau kurang lebih tiga minggu sebelum proposal dana *bailout* disetujui, pemerintah Yunani menutup bank-bank di Yunani untuk mencegah berkurangnya kas perbankan secara drastis, pemerintah juga membatasi penarikan uang dari mesin ATM menjadi €60 per hari. Dengan dana ELA yang berasal dari ECB tersebut, pemerintah Yunani dapat kembali mengoperasikan sektor perbankan sesuai dengan fungsinya. PM Alexis Tsipras kemudian mulai membuka kembali bank-bank tersebut pada hari Senin, 20 Juli 2015, atau dua hari setelah *bailout* disetujui.

⁵ Reuters, "ECB Will Accept Even Junk-Rated Greek Bonds" (Online) <http://www.reuters.com/article/idUSLDE6420A920100503> diakses pada 8 November 2016

Selain dari sektor perbankan, perekonomian Yunani juga terus mengalami perubahan positif. Neraca perekonomian Yunani berhasil mencetak surplus dari defisit selama tujuh bulan berturut-turut. Setelah dilakukan audit, neraca perekonomian Yunani tercatat mencetak keuntungan sebesar €407,2 juta pasca persetujuan *bailout*. Hal tersebut tidak lepas dari pengaruh perusahaan peringkat kredit Standart & Poor's yang menaikkan peringkat kredit Yunani dari CCC- menjadi CCC+ pada Rabu, 22 Juli 2015. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh langkah pemerintah Yunani untuk menyetujui persyaratan dana talangan yang ditawarkan oleh Uni Eropa. Hasilnya, pasar saham Yunani mengalami peningkatan yang berimbas kepada meningkatnya minat investasi yang kemudian berpengaruh kepada laju perekonomian Yunani secara keseluruhan. Keberhasilan Yunani dalam hal tersebut merupakan hasil kalkulasi yang akurat dari pemerintahan dibawah Alexis Tsipras.

III. Menjamin Keamanan Yunani Dalam Jangka Panjang

Sebuah negara pasti akan mengedepankan aspek keamanan negara sebagai manifestasi dari salah satu fungsi negara yaitu melindungi rakyatnya. Dengan asumsi tersebut, maka dapat dipastikan bahwa keputusan Yunani untuk menyetujui persyaratan dana talangan dan kemudian menerimanya salah satunya adalah dari segi keamanan dimana berada di dalam naungan Uni Eropa jauh lebih baik dari melepas keanggotaan Uni Eropa.

Skenario terburuk dari krisis Yunani adalah dengan kemungkinan keluarnya Yunani dari keanggotaan Eurozone dan Uni Eropa, yang artinya

Yunani tidak lagi mendapatkan dukungan militer dari Uni Eropa karena tidak lagi tergabung dengan aliansi militer Uni Eropa. Namun meskipun Yunani tetap tergabung dalam NATO, ada kemungkinan lain dimana Yunani bisa saja kehilangan dukungan militer dari NATO. Hal tersebut adalah dampak dari perubahan peta politik Yunani apabila keluar dari Uni Eropa. Pemerintah Yunani pernah menyatakan bahwa apabila Yunani gagal mendapatkan dukungan ekonomi dari Uni Eropa, maka Yunani harus mencari sumber lain. Sumber dana yang dimaksud tersebut diketahui kemudian adalah Rusia atau China.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka apabila Yunani gagal mendapatkan dana dari Uni Eropa, maka kemungkinan skenario terbesar adalah merubah peta politik luar negerinya menjadi condong ke arah Rusia dan China. Perlu diketahui bahwa NATO dan negara-negara komunis seperti Rusia dan China memiliki sejarah yang gelap dan kerap terjadi konflik diantara kedua pihak tersebut. Maka akan wajar apabila Yunani kemudian kehilangan dukungan dari Uni Eropa dan NATO sekaligus apabila Yunani memutuskan untuk tidak menerima persyaratan *bailout* yang ditawarkan oleh Uni Eropa.

Apabila hal tersebut terjadi, maka kemungkinan adanya *security dilemma* di Yunani sangat besar. Pasalnya, Yunani berbatasan langsung dengan Turki di wilayah timur laut. Turki merupakan negara dengan kekuatan militer terbesar kedua di NATO setelah Amerika Serikat. Selain itu, hubungan antara Yunani dan Turki tidak begitu baik meskipun sama-sama tergabung dengan Uni Eropa. Yunani dan Turki terlibat sengketa memperebutkan

wilayah perairan Laut Aegea sejak tahun 1970.⁶ Insiden-insiden baku tembak yang melibatkan militer antara kedua negara kerap terjadi dari tahun 1974 hingga 2006.⁷

Apabila Yunani dinyatakan keluar dari keanggotaan Uni Eropa dan kehilangan dukungan dari NATO, maka Turki akan memiliki dukungan pembenaran untuk melanjutkan sengketa dengan Yunani tersebut untuk masuk ke dalam tahap konflik. Maka, dapat dinyatakan bahwa keputusan Yunani untuk menerima *bailout* dari Uni Eropa merupakan langkah yang paling tepat dan paling menguntungkan bagi Yunani. Keanggotaannya dalam Uni Eropa adalah hal mutlak yang dibutuhkan oleh Yunani agar bisa mempertahankan kedaulatannya untuk masa mendatang.

B. Kerugian Yunani Menerima Bailout Tahun 2015

Selain menerima keuntungan, tentunya dalam setiap pilihan memiliki sisi negatif meskipun tidak sebesar sisi positifnya. Tak berbeda dengan pemerintah Yunani dibawah kepemimpinan Alexis Tsipras ketika mengambil keputusan untuk menerima bailout dari Uni Eropa. Kerugian – kerugian yang harus diterima Yunani yakni:

I. Hutang Luar Negeri Bertambah

Bailout pada dasarnya merupakan hutang luar negeri. Pada kasus krisis ekonomi Yunani, bailout yang diberikan oleh Uni Eropa memang membantu

⁶ Turkey Embassy Official Website
https://web.archive.org/web/20060415091248/http://www.turkishembassy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=225&Itemid=240 diakses pada 10 November 2016

⁷ Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs Official Website
<http://vasington.be.mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.aspx?ID=115955> diakses pada 8 November 2016

Yunani melunasi hutangnya ke IMF, setelah menerima bailout dari Uni Eropa, Yunani tidak lagi memiliki hutang kepada IMF. Namun bukan berarti permasalahan hutang luar negeri Yunani sudah berakhir, hingga saat ini jumlah total hutang luar negeri Yunani telah meningkat menjadi 327 milyar Euro.

II. Tingkat Pengangguran Meningkat

Bailout dari Uni Eropa selalu ditawarkan beserta persyaratan-persyaratan seperti kebijakan penghematan dalam negeri dan efisiensi dalam hal perekonomian lainnya. Kebijakan penghematan tersebut banyak difokuskan di sektor publik seperti pemotongan hubungan kerja, reformasi pajak, dan dana pensiun. Kebijakan seperti pemotongan hubungan kerja memang efektif dilakukan dengan tujuan menghemat anggaran. Namun, efek sampingnya adalah tingkat pengangguran menjadi semakin tinggi. Pada masa kepemimpinan Alexis Tsipras tingkat pengangguran Yunani telah mencapai 24%.⁸ Terlebih, tingkat pengangguran yang tinggi tersebut berbanding lurus dengan tingkat produktivitas yang rendah di Yunani. Tingkat produktivitas yang rendah menandakan bahwa Yunani tidak memiliki kekuatan yang dapat mendukung untuk mengatasi krisis yang sedang berlangsung.

C. Keuntungan Yunani Menolak Bailout 2015

⁸ NPR, Working Without Pay a Reality for Much of Greece's Labor Force
<http://www.npr.org/sections/parallels/2014/03/15/283995626/working-without-pay-a-reality-for-much-of-greeces-labor-force> diakses pada 28 Juli 2016

Apabila pemerintah Yunani konsisten dengan hasil referendum dan kemudian mengambil keputusan untuk menolak bailout yang ditawarkan oleh Uni Eropa, maka keuntungan yang didapatkan oleh Yunani adalah:

I. Kedaulatan Perekonomian

Menolak bailout, dalam arti lain Yunani mengambil keputusan untuk *grexit*. Dalam situasi seperti itu, meskipun Yunani tidak lagi menggunakan mata uang Euro sebagai mata uang resmi negaranya, namun Yunani memiliki kendali penuh atas pengelolaan mata uang barunya, yakni Drachma, tanpa harus terikat dengan peraturan-peraturan Eurozone. Salah satunya adalah Yunani dapat menerapkan kebijakan devaluasi mata uang dengan tujuan untuk menggenjot perekonomian dalam negerinya. Sebelumnya, ketika menggunakan mata uang Euro, kebijakan devaluasi merupakan hal yang dilarang oleh Uni Eropa.

II. Meningkatnya Tingkat Kepuasan Rakyat

Rakyat Yunani selama ini terbebani dengan persyaratan-persyaratan bailout yang selalu menuntut Yunani untuk menerapkan kebijakan penghematan anggaran belanja dalam negeri. Dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah tingkat pengangguran yang tinggi dan secara otomatis juga tingkat kemiskinan yang meningkat. Oleh karena itu, apabila pemerintah mengambil sikap untuk menolak bailout sesuai dengan hasil referendum, hal tersebut menandakan bahwa pemerintah telah menjalankan tugas demokrasiya dengan baik dan berani mengorbankan perekonomian negara demi kesejahteraan rakyat.

D. Kerugian Yunani Menolak Bailout 2015

Meskipun Yunani menerima sedikit keuntungan dari pilihan tersebut, namun hal itu tidak sebanding dengan kerugian yang menanti Yunani apabila Alexis Tsipras memutuskan untuk menolak bailout sesuai dengan hasil referendum. Kerugian-kerugian yang mungkin akan dialami Yunani adalah:

I. Keluar dari Keanggotaan Uni Eropa atau Grexit

Sebelum referendum diselenggarakan, Perdana Menteri Alexis Tsipras sebelumnya telah mendapat ancaman dari petinggi-petinggi Uni Eropa bahwa hasil negatif pada referendum akan berakibat kepada keluarnya Yunani dari keanggotaan Uni Eropa. Apabila hal tersebut terjadi, artinya Yunani harus menjalin ulang hubungan bilateral dengan seluruh negara anggota Uni Eropa. Selain itu, Yunani akan mengalami kerugian di bidang perekonomian karena tidak lagi dapat merasakan pasar bebas milik Uni Eropa. Terlebih secara fakta, partner ekspor dan impor terbesar Yunani adalah Jerman dan Italia.

II. Dinyatakan Bangkrut

Hutang Yunani kepada IMF jatuh tempo pada bulan Juli 2015, hanya berselang kurang lebih dua minggu dari referendum. Pada saat itu, apabila Yunani mengambil keputusan sesuai dengan hasil referendum yakni menolak bailout, maka IMF akan menyatakan bahwa Yunani mengalami *default* atau bangkrut.⁹ Pernyataan bangkrut dari lembaga sebesar IMF akan sangat

⁹ CTV News, "Greece Fails To Make IMF Payment As Bailout Expires" (Online)
<http://www.ctvnews.ca/business/greece-fails-to-make-imf-payment-as-bailout-expires-1.2446852>
diakses pada 8 November 2016

berpengaruh kepada perekonomian Yunani. Imbas dari pernyataan tersebut adalah pada bidang investasi. Investor asing akan menarik minatnya untuk berinvestasi di Yunani karena Yunani tidak memiliki potensi perekonomian yang tinggi. Pada akhirnya, Yunani bisa saja jatuh menjadi negara dunia ketiga dengan perekonomian yang sangat lemah.